
ANALISIS PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA DEBAT ROY
SURYO TANTANG BUKTI IJAZAH JOKOWI, TAK ADA LEMBAR
PENGESAHAN

Elza L Saragih¹, Winda Simbolon², Eka Maryana Losiya Br Panjaitan³, May
Liza Putri Girsang⁴

elsadaifrozen@gmail.com¹, winda.simbolon2211@student.uhn.ac.id²,
ekamaryanalosiyabrpanjaitan06@gmail.com³, liza.girsang@student.uhn.ac.id⁴

^{1,2,3,4}Universitas HKBP Nommensen, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the use of the Indonesian language in the public debate involving Roy Suryo, who questioned the authenticity of President Joko Widodo's diploma, particularly focusing on the absence of a validation sheet. The analysis centers on linguistic aspects such as phonology, morphology, syntax, semantics, and the appropriateness of formal language use in public discourse. This research employs a qualitative descriptive method, using documentation and transcription techniques from video recordings and online news articles. The findings reveal several violations of standard language rules, including improper diction, ineffective sentence structures, and rhetorical or emotional expressions that overshadow logical argumentation. Moreover, instances of informal language and code-mixing were found, which potentially obscure the objectivity of the arguments. This study is expected to raise language awareness in political discourse, encouraging the use of ethical, clear, and accurate Indonesian.

Keywords: *Language Analysis, Public Debate, Roy Suryo, Jokowi Diploma, Indonesian Language Norms.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan bahasa Indonesia dalam debat publik antara Roy Suryo yang mempertanyakan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, khususnya pada aspek kebahasaan yang muncul dalam pernyataan-pernyataan yang tersebar di media. Fokus penelitian ini meliputi analisis kesesuaian penggunaan bahasa Indonesia berdasarkan kaidah fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, serta penggunaan ragam bahasa formal dalam wacana publik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan transkripsi pernyataan

dalam tayangan video debat serta artikel berita daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa pelanggaran kaidah kebahasaan, seperti penggunaan diksi yang tidak tepat, kalimat yang kurang efektif, serta pemilihan gaya bahasa yang lebih bersifat retorik dan emosional daripada argumentatif. Selain itu, ditemukan pula penggunaan bahasa informal dan campur kode yang mengaburkan objektivitas argumen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kesadaran berbahasa dalam diskursus politik agar tetap menjaga etika, kejelasan, dan keakuratan bahasa Indonesia.

Kata Kunci: Analisis Bahasa, Debat Publik, Roy Suryo, Ijazah Jokowi, Kaidah Bahasa Indonesia.

PENDAHULUAN

Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional sekaligus bahasa resmi negara yang memiliki peran penting sebagai sarana pemersatu masyarakat yang beragam. Sebagai bagian dari jati diri bangsa, Bahasa Indonesia memainkan peran vital dalam berbagai bidang kehidupan, seperti dunia pendidikan, pemerintahan, media, hingga komunikasi sehari-hari. Namun, di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi digital, penggunaan Bahasa Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk menurunnya kualitas, kurangnya kedisiplinan dalam berbahasa, serta dominasi pengaruh bahasa asing.

Penggunaan Bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan aturan kebahasaan, baik secara lisan maupun tulisan, kini marak dijumpai, terutama di kalangan pelajar, mahasiswa, serta pengguna media sosial dan platform daring lainnya. Selain itu, penggunaan

kata-kata asing yang langsung diserap tanpa penyesuaian makna maupun struktur turut mengancam kemurnian dan keberlangsungan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

Presiden Joko Widodo, sebagai figur sentral dalam dunia politik Indonesia, tidak terlepas dari sorotan dan berbagai kontroversi yang berkembang di tengah masyarakat. Salah satu isu yang sempat ramai diperbincangkan adalah dugaan pemalsuan ijazah pendidikan beliau, khususnya yang berasal dari Universitas Gadjah Mada (UGM), tempat di mana beliau diketahui menempuh pendidikan tinggi. Tuduhan tersebut menyebar luas melalui berbagai platform media sosial dan memicu diskusi di ruang publik, bahkan turut menjadi bagian dari dinamika politik nasional.

Munculnya isu ini menimbulkan kekhawatiran, bukan hanya karena menyentuh ranah pribadi dan

kredibilitas seorang presiden, tetapi juga karena mencerminkan kuatnya pengaruh arus informasi—baik yang akurat maupun yang menyesatkan—dalam membentuk persepsi publik di era digital. Oleh karena itu, topik ini menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam dalam perspektif komunikasi politik, etika dalam ruang publik, serta tingkat literasi media di tengah masyarakat modern.

Kondisi tersebut memunculkan keprihatinan terhadap semakin rendahnya penghargaan dan kesadaran masyarakat, terutama generasi muda, dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal, kemampuan menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan aturan tidak hanya menunjukkan keterampilan berkomunikasi, tetapi juga mencerminkan identitas dan semangat kebangsaan.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya penelitian yang menelaah bagaimana pola penggunaan Bahasa Indonesia di kalangan [contohnya: pelajar, mahasiswa, atau masyarakat umum], baik dalam situasi resmi maupun tidak resmi. Miniriset ini bertujuan untuk mengetahui berbagai bentuk penyimpangan bahasa yang sering terjadi, mengungkap faktor-faktor yang memengaruhinya, serta merumuskan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dalam berbahasa sesuai kaidah. Hasil dari penelitian ini

diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjaga dan memperkuat peran Bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan dan identitas nasional.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari miniriset ini adalah :

1. Apa saja bentuk kesalahan berbahasa yang muncul dalam debat Roy Suryo terkait bukti ijazah Jokowi?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan berbahasa dalam debat tersebut?
3. Bagaimana dampak kesalahan berbahasa tersebut terhadap pemahaman dan interpretasi publik?
4. Bagaimana kesalahan berbahasa tersebut mencerminkan penggunaan bahasa dalam konteks debat politik di Indonesia?

Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dari miniriset ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk kesalahan berbahasa yang muncul dalam debat Roy Suryo terkait bukti ijazah Jokowi.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan berbahasa dalam debat tersebut.

3. Untuk menjelaskan dampak kesalahan berbahasa terhadap pemahaman dan interpretasi publik terhadap isu yang dibahas.
4. Untuk menggambarkan bagaimana kesalahan berbahasa mencerminkan penggunaan bahasa dalam konteks debat politik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian Deskriptif Kualitatif

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif dan mendalam mengenai kesalahan berbahasa dalam tuturan Roy Suryo pada konteks debat publik. Menurut Moleong (2012:6), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan. Dalam hal ini, kesalahan berbahasa dilihat tidak hanya sebagai penyimpangan linguistik, tetapi juga sebagai refleksi dari kondisi sosial dan komunikatif yang melingkupi peristiwa ujar.

2.2 Analisis Wacana sebagai Pendekatan Studi

Analisis wacana digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji bahasa dalam penggunaannya yang nyata, yaitu dalam wacana debat. Fairclough (1995) menegaskan bahwa

wacana adalah bentuk praktik sosial yang tidak hanya mencerminkan, tetapi juga membentuk struktur sosial. Dengan analisis wacana, peneliti dapat memahami bagaimana bahasa digunakan dalam konteks kekuasaan, ideologi, dan strategi komunikasi.

Sementara itu, menurut pendapat yang lain menyatakan bahwa dalam interaksi lisan, struktur wacana dibangun dari fungsi tekstur bahasa yang mempengaruhi hubungan antarpartisipan. Dalam konteks debat, kesalahan berbahasa tidak dapat dilepaskan dari situasi interaktif dan intensionalitas komunikatif yang sedang berlangsung.

2.3 Konsep Kesalahan Berbahasa

Kesalahan berbahasa merupakan bentuk penyimpangan terhadap kaidah bahasa yang berlaku. Menurut Kridalaksana (2001), kesalahan bahasa adalah penyimpangan dari norma atau sistem bahasa yang berlaku. Corder (1973) menyebutkan bahwa kesalahan dapat dianalisis untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran atau penggunaan bahasa berlangsung.

Jenis-jenis kesalahan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tataran: Fonologis: kesalahan dalam pelafalan bunyi.

Morfologis: kesalahan dalam pembentukan kata. Sintaksis: kesalahan dalam struktur atau

susunan kalimat. Semantik: kekeliruan dalam pemilihan makna kata.

Pragmatik: kesalahan dalam penggunaan bahasa yang tidak sesuai konteks.

2.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber utama data dalam penelitian ini adalah video debat Roy Suryo yang membahas dugaan ijazah Presiden Joko Widodo. Tuturan verbal Roy Suryo dalam video tersebut menjadi fokus kajian untuk diidentifikasi dan dianalisis dari aspek kebahasaannya.

Data dikumpulkan dengan teknik:

Observasi tidak langsung: menyimak video debat secara berulang.

Dokumentasi: mencatat kutipan tuturan yang menunjukkan kesalahan berbahasa.

Studi pustaka: memperkuat analisis dengan teori-teori linguistik dari literatur terpercaya.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap:

1. Transkripsi dan identifikasi: menyalin dan menandai bagian tuturan yang mengandung kesalahan. Klasifikasi bentuk kesalahan berdasarkan jenis dan tataran bahasa.

2. Interpretasi konteks: menganalisis faktor penyebab dan dampak kesalahan terhadap efektivitas komunikasi.

Penarikan simpulan untuk memahami fungsi dan peran kesalahan berbahasa dalam dinamika wacana publik. Seperti dikemukakan oleh Tarigan (1997), kesalahan berbahasa dapat terjadi karena kurangnya penguasaan struktur bahasa, interferensi bahasa lain, atau ketidaksesuaian penggunaan dalam konteks tertentu. Pendekatan ini menempatkan kesalahan bahasa sebagai bagian dari proses komunikasi, bukan sekadar kelemahan teknis.

2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa bahasa dalam wacana publik harus dikelola secara cermat. Ketika seseorang tampil dalam forum publik, penggunaan bahasa yang tidak tepat dapat menimbulkan persepsi negatif, menurunkan kredibilitas, bahkan memunculkan bias informasi.

Berdasarkan pendekatan ini, data tuturan Roy Suryo akan dianalisis melalui langkah-langkah berikut:

Pengumpulan data (video debat), Transkripsi dan identifikasi kesalahan, Klasifikasi jenis kesalahan, Analisis kontekstual dengan teori linguistik, Penafsiran dampak

kesalahan dalam komunikasi publik. Proses ini bertujuan mengungkap bagaimana kesalahan bahasa tidak hanya mencerminkan aspek teknis, tetapi juga aspek ideologis, sosial, dan pragmatis dari praktik berbahasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1. Bentuk Penggunaan Bahasa Indonesia

1. Bahasa Tidak Baku

Fokus pada Penggunaan kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia formal (EYD/PUEBI).

Contoh:

1. "Enggak mas?" → "Tidak, Mas?"
2. "Gini-gini" → sebaiknya "Begini"
3. "Nggak perlu" → sebaiknya "Tidak perlu"

Catatan: Bahasa tidak baku ini umum di percakapan informal, tetapi tidak cocok untuk komunikasi resmi.

2. Kalimat Tidak Efektif

Fokus pada Kalimat panjang, berulang, atau membingungkan karena struktur tidak jelas. Contoh:

1. "Nah ini, ini yang saya lihat. Ini ijazahnya enggak mas? Nah ini, ini saya lihat."
→ Pengulangan tidak efektif. Bisa dipadatkan menjadi: "Saya melihat ini, apakah ini ijazahnya, Mas?"

2. "Saya tidak harus menjawab itu karena ini semua sudamasalah."

→ Kurang jelas dan tidak runtut. Bisa diperbaiki menjadi: "Saya tidak perlu menjawab karena hal ini sudah menjadi masalah hukum."

3. Campur Kode (Bahasa Asing)

Fokus pada penggunaan istilah asing tanpa terjemahan atau penyesuaian. Contoh:

1. "Source of document-nya itu apa?"
→ Lebih baik: "Apa sumber dokumennya?"
2. "Digital evidence" dan "digital forensik"
→ Sebaiknya: "Bukti digital" dan "forensik digital"

Catatan: Campur kode sebaiknya dihindari dalam konteks formal atau akademik, kecuali istilah tidak memiliki padanan tepat.

4. Gaya Bahasa Lisan (Tuturan Langsung)

Fokus pada Struktur kalimat yang khas percakapan langsung, bukan bentuk tulisan formal. Contoh:

- "Mas, tanya enggak? Tahu enggak ada itu?"
→ Ini bentuk lisan. Bentuk tulisannya bisa:

"Apakah Anda sudah menanyakan hal tersebut? Apakah Anda tahu itu ada?"

- "Bang Roy, sebentar, sebentar."
→ Lebih baku: "Saudara Roy, mohon tunggu sebentar."

5. Bahasa Emosional/Argumentatif
Fokus: Mengandung nada debat, emosional, atau sindiran.

Contoh:

1. "Banyol banget ini." → Istilah slang, tidak formal.
Bisa diganti dengan: "Pernyataan ini tampaknya tidak masuk akal."
- "Loh, tapi waktu yang ditampilkan itu tidak diakui memang itu asli."
→ Kalimat ambigu dan tidak runtut.
Bisa disusun ulang: "Namun, saat dokumen itu ditampilkan, belum ada pengakuan resmi bahwa itu adalah dokumen asli."

2.2 Faktor Penyebab terjadinya Kesalahan Berbahasa

1. Kondisi Komunikasi: Debat Televisi yang Bersifat Lisan dan Interaktif

Karena debat berlangsung secara langsung di media televisi, pola penggunaan bahasa lebih mencerminkan karakteristik komunikasi lisan dibandingkan tulisan. Ucapan para peserta debat cenderung spontan, tidak terstruktur,

serta bersifat informal dan emosional, sehingga sering kali tidak mengikuti aturan bahasa baku.

Contoh:

Ungkapan seperti "*Nah ini, ini yang saya lihat*" atau "*Gini mas, saya belum selesai*"

Menunjukkan spontanitas dalam berpendapat.

2. Faktor Emosi dan Tekanan Mental

Topik debat yang menyentuh isu penting seperti kredibilitas tokoh negara membuat pembicara berada dalam tekanan psikologis. Akibatnya, muncul penggunaan kalimat yang tidak sempurna, pengulangan kata, hingga gangguan dalam penyampaian yang terstruktur.

Contoh:

Frasa "*Foto yang sama? Foto yang sama*" digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam suasana tegang.

3. Upaya Membangun Keakraban dan Memengaruhi Audiens

Penggunaan sapaan seperti "mas", atau kata informal seperti "gini", "nggak", dan "udah" mencerminkan strategi membangun hubungan emosional dan membuat suasana debat lebih santai. Pendekatan ini kerap digunakan untuk menciptakan kedekatan dengan lawan bicara maupun pemirsa.

Contoh:

Ungkapan seperti "*Saya tanya ya mas, ini aslinya dari mana?*"

menunjukkan komunikasi yang bersifat akrab dan interaktif.

4. Minimnya Kesadaran Akan Penggunaan Bahasa Baku di Media Publik

Meski debat berlangsung di ruang publik dan disaksikan luas, sebagian peserta masih menggunakan bahasa informal. Hal ini memperlihatkan bahwa kesadaran berbahasa sesuai kaidah belum sepenuhnya tertanam dalam praktik komunikasi di ruang publik.

5. Penggunaan Bahasa Campuran Akibat Istilah Teknis

Munculnya istilah seperti "*digital forensik*", "*dokumen fisik*", dan "*analisis*" memperlihatkan adanya pencampuran antara bahasa teknis dan bahasa sehari-hari. Hal ini mencerminkan kurangnya konsistensi dalam gaya berbahasa serta kemungkinan ketidakpahaman terhadap padanan kata dalam Bahasa Indonesia.

2.3 Dampak kesalahan berbahasa terhadap pemahaman dan interpretasi publik terhadap isu yang dibahas.

Dampak kesalahan berbahasa terhadap pemahaman dan interpretasi publik dalam konteks isu konflik ijazah palsu Presiden Jokowi yang pernah ramai di media dan ruang publik:

1. Menimbulkan Misinformasi atau Disinformasi di Tengah Publik

Kesalahan dalam penggunaan istilah seperti "*palsu*", "*diduga*", atau "*ilegal*" tanpa penjelasan yang akurat atau konteks yang benar bisa membuat publik menelan informasi mentah-mentah. Contoh: Judul berita yang menyebut "Jokowi Gunakan Ijazah Palsu" tanpa menyertakan kata "dugaan" atau "klaim sepihak" dapat membentuk opini publik bahwa informasi tersebut sudah terbukti benar.

Dampaknya: Terjadi misinformasi massal, di mana sebagian masyarakat langsung percaya, padahal belum ada verifikasi hukum. Ini memperkeruh suasana politik dan menurunkan kualitas diskusi publik.

2. Memperkuat Polarisasi Politik dan Sentimen Negatif

Kalimat yang ambigu atau retorik seperti "Rakyat berhak tahu kebenaran ijazah pemimpinnya!" tanpa klarifikasi hukum atau sumber valid dapat ditafsirkan sebagai tuduhan. Bahasa seperti ini sering dipakai oleh tokoh politik atau akun media sosial oposisi yang tidak hati-hati dalam berbahasa.

Dampaknya: Kesalahan ini memperkuat perpecahan antara pendukung dan penentang pemerintah. Interpretasi publik menjadi terbagi tajam, bukan berdasarkan fakta, tapi karena bias

yang dipicu oleh bahasa yang tidak objektif.

3. Merusak Reputasi dan Kredibilitas Tokoh atau Institusi.
Kesalahan berbahasa dalam pernyataan resmi – misalnya, pernyataan dari kuasa hukum tokoh Masyarakat atau media yang tidak presisi atau tidak sesuai kaidah hukum bisa merusak reputasi. Contoh: Jika media menyebut “Pengadilan menyatakan ijazah Jokowi tidak sah” padahal sebenarnya hanya *mengabulkan gugatan untuk diperiksa lebih lanjut*, maka informasi itu misleading.

Dampaknya: Publik salah menilai proses hukum yang masih berjalan sebagai keputusan final, yang kemudian mencoreng nama baik tokoh (dalam hal ini Presiden Jokowi) secara prematur.

4. Munculnya Kebingungan dan Ketidakjelasan

Percakapan yang tidak terstruktur, penuh gangguan, pengulangan, serta kalimat yang tidak selesai menyebabkan inti pesan sulit dimengerti oleh audiens, sehingga menimbulkan kebingungan

5. Turunnya Kepercayaan terhadap Pembicara

Cara penyampaian yang tidak runtut, emosional, dan menghindari jawaban langsung membuat pembicara terlihat tidak profesional atau kurang memiliki landasan data,

yang akhirnya mengurangi kepercayaan publik terhadapnya.

2.4. Bagaimana Kesalahan Berbahasa Mencerminkan Penggunaan Bahasa dalam Konteks Debat Politik di Indonesia:

Isu dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi memperlihatkan bagaimana kesalahan dalam penggunaan bahasa menjadi gambaran cara bahasa dimanfaatkan dalam perdebatan politik di Indonesia. Dalam banyak kasus, bahasa politik tidak selalu digunakan untuk menyampaikan informasi secara jernih dan objektif, melainkan kerap menjadi alat untuk menggiring opini mempermainkan emosi public dan memperkuat agenda tertentu.

Perdebatan politik di Indonesia seringkali tidak dibangun di atas dasar argumen yang logis tetapi lebih menekankan daya tarik emosional melalui pemilihan kata-kata yang provokatif. Kesalahan berbahasa yang muncul bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap kaidah bahasa, melainkan juga merupakan bentuk strategi komunikasi yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan pengaruh tertentu terhadap masyarakat.

Salah satu bentuk penggunaan bahasa yang sering muncul adalah kalimat bernada menyindir atau

menyiratkan tuduhan tanpa menyatakannya secara langsung. Misalnya, ketika seorang tokoh berkata, "Rakyat berhak tahu latar belakang pendidikan pemimpinnya," pernyataan ini bisa dimaknai sebagai tuduhan terselubung, meski tidak menyebut secara eksplisit bahwa pemimpin tersebut melakukan pemalsuan ijazah. Bahasa seperti ini berisiko karena menciptakan ambiguitas makna dan dapat memicu salah tafsir di kalangan masyarakat.

Selain itu, kesalahan berbahasa juga memperlihatkan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap istilah hukum dan administratif. Banyak orang yang tidak dapat membedakan antara proses hukum, keputusan pengadilan, dan tuduhan. Kesalahan dalam memahami kalimat seperti "gugatan diterima" yang kemudian dianggap sebagai "pembuktian kesalahan" adalah contoh nyata dari kurangnya ketelitian dalam berbahasa dan memahami makna sebenarnya dari suatu istilah hukum.

Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa penggunaan bahasa dalam politik sering kali kurang memperhatikan etika berbahasa. Alih-alih menjelaskan permasalahan, bahasa justru digunakan untuk menimbulkan kebingungan, memperkeruh suasana, bahkan menyebarkan kebencian.

Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, penyalahgunaan bahasa dalam konteks politik bisa memicu konflik dan memperbesar kesenjangan sosial.

Fenomena ini juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kemampuan berbicara secara persuasif dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi secara benar. Banyak tokoh publik yang pandai memainkan kata-kata, namun kurang memperhatikan kebenaran isi pernyataannya. Dalam sistem demokrasi, hal ini menjadi persoalan serius karena dapat menyesatkan masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap lembaga-lembaga penting negara.

Dengan demikian, kesalahan berbahasa dalam isu politik, seperti pada kasus ijazah Jokowi, mencerminkan masalah yang lebih dalam dalam praktik berbahasa di ranah politik: adanya kecenderungan manipulatif, rendahnya kesadaran kritis masyarakat, serta minimnya tanggung jawab dalam menyampaikan informasi secara jujur dan akurat. Untuk itu, literasi bahasa dan politik perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat berpikir lebih kritis dan tidak mudah terbawa arus informasi yang menyesatkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tuturan dalam video debat Roy Suryo terkait ijazah Presiden Joko Widodo, ditemukan berbagai bentuk kesalahan bahasa, baik dari segi tata bahasa (morfologi dan sintaksis), pilihan kata (diksi), maupun logika kalimat. Kesalahan-kesalahan tersebut mencerminkan kurangnya kehati-hatian dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam konteks formal dan publik seperti debat atau pernyataan resmi.

Kesalahan-kesalahan bahasa tersebut juga menunjukkan bahwa dalam komunikasi publik, aspek bahasa tidak dapat diabaikan. Bahasa bukan hanya sebagai alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga merupakan cerminan pikiran dan kredibilitas narasumber. Oleh karena itu, penting bagi tokoh masyarakat untuk memperhatikan kualitas bahasa yang digunakan agar pesan tersampaikan secara efektif dan tidak menimbulkan multitafsir atau kesalahpahaman.

Saran

1. Bagi tokoh masyarakat dan Narasumber debat sebaiknya ditingkatkan kesadaran dan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar,

terutama dalam forum resmi atau publik. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas dan mencegah kesalahpahaman.

2. Bagi lembaga penyiaran dan media massa, disarankan untuk melakukan penyuntingan atau memberikan edukasi bahasa kepada narasumber, terutama dalam debat atau diskusi terbuka, agar komunikasi yang disampaikan lebih berkualitas dan mengedukasi masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan memperluas objek penelitian ke tokoh atau wacana lain di media massa, agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang fenomena kesalahan berbahasa di ruang publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi ke-4). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Keraf, Gorys. (2009). *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. Jakarta: Gramedia.
- Kridalaksana, Harimurti. (2011). *Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

-
- Moeliono, Anton M. (2017). *Santun Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mulyana, Deddy. (2005). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sudaryat, Yayat. (2009). *Bahasa dalam Perspektif Kultural*. Bandung: Refika Aditama.
- Suryadi, Endang. (2010). *Strategi Berbahasa dan Komunikasi dalam Interaksi Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yuniarti, D. (2022, Oktober 2). "Roy Suryo Tantang Bukti Ijazah Jokowi, Tak Ada Lembar Pengesahan". *Kompas.com*. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/02/xxxxx>
- Yuliana, E. (2017). *Kesalahan Berbahasa dalam Media Massa Indonesia*. Jakarta: PT Indeks.